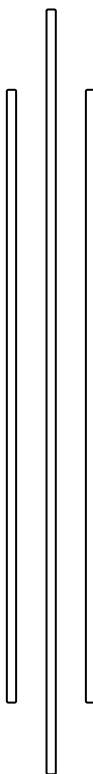




RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021 – 2026, dan menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2024.

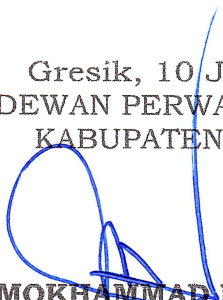
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik – baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya dokumen ini. Namun demikian masukan dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan dari semua pihak agar dikemudian hari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik lebih sempurna.

Gresik, 10 Juli 2024
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
 BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-43
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-46
2.4. Review terhadap RKPD	II-47
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-65
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-2
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 IV-1
 BAB V : PENUTUP	 V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan nasional termasuk daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Salah satu dokumen perencanaan tahunan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dasar pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup kerangka ekonomi daerah, asumsi dasar, prioritas pembangunan daerah, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Sekretariat DPRD) sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2025. Perumusan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik di tahun 2024 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 didasarkan pada penjaringan aspirasi, yaitu keluaran dari sinkronisasi hasil usulan dari bawah ke atas (bottom-up) dengan usulan dari atas ke bawah (top-down) yang secara formal diformulasikan melalui Forum Organisasi

Perangkat Daerah (Forum OPD) dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik serta Kelompok Pemerhati dan *Stakeholders* terkait.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dan menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025, yang pembahasannya dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

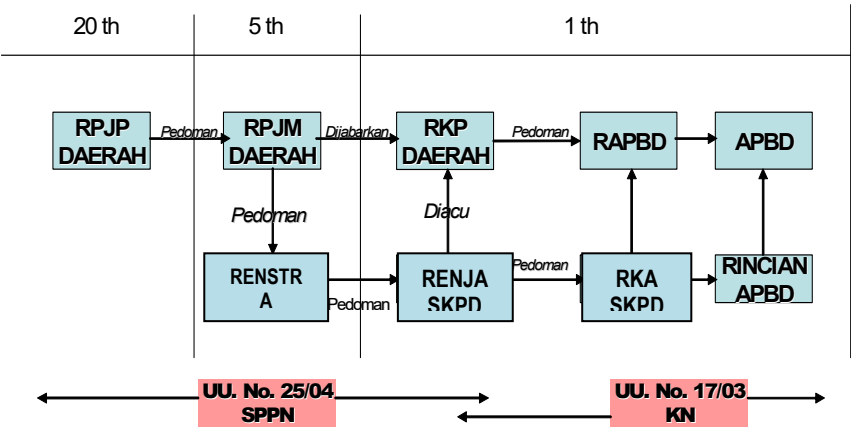
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya dapat dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Renja Perangkat Daerah tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, menjadi bahan untuk menyusun dokumen RKPD yang pembahasannya dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan RKA SKPD dan Penyusunan Rancangan APBD, sehingga terwujud konsistensi antara Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah mulai dari jangka panjang, menengah dan tahunan.

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen

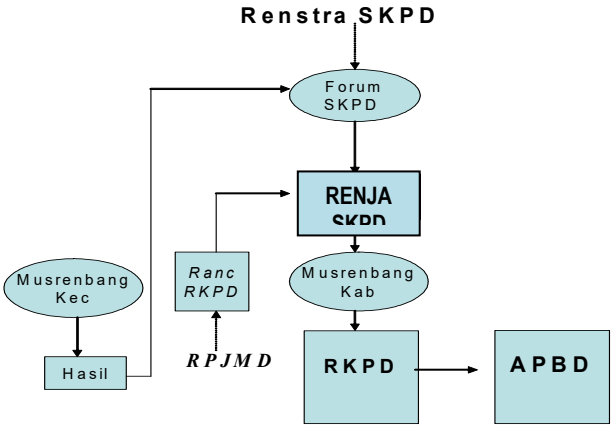
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.
KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Sedangkan alur proses penyusunan Renja SKPD sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.
ALUR PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD



1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025, antara lain meliputi :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

B. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana Instansional sebagai tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber daya organisasi;
4. Menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dan penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat Daerah; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebesar Rp. 89.838.371.811,00 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 80.824.043.736,23 (delapan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) atau sebesar 89,97% dari pagu anggaran yang tersedia yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 42.892.083.332,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 42.107.628.294,23 (empat puluh dua milyar seratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) atau sebesar 98,17% dari pagu anggaran yang tersedia dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 46.946.288.479,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 38.716.415.442,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 82,47% dari pagu anggaran yang tersedia. Dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Ket
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%

Tabel 2

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome / Output	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	25 Dokumen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	17 Laporan	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome / Output	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4 Laporan	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	1 153 Dokumen	1 155 Dokumen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	36 orang/bulan	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 138 Dokumen	1 140 Dokumen	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	9 Laporan	9 Laporan	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome / Output	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	steran SKPD				
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	17 Dokumen	22 Dokumen		
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	22 Dokumen	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	20 Orang	Menyesuaikan Undangan	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	14 Orang	Menyesuaikan Undangan	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	241 Dokumen	478 Dokumen		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome / Output	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2 Paket	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	74 Paket	74 Paket	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	7 Paket	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	132 Laporan	371 Laporan	Menyesuaikan Kunjungan Tamu	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	15 Laporan	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	3 Unit	5 Unit		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5 Unit	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome / Output	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	180 Laporan	465 Laporan		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 Laporan	66 Laporan	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78 Laporan	375 Laporan	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	294 Unit	384 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	3 Unit	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	69 Unit	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome / Output	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	300 Dokumen	312 Dokumen		
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	Menyesuaikan Undangan	-
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	269 Dokumen	281 Dokumen	Pemuatan advetorial menyesuaikan kebutuhan baik event maupun promo khusus	-
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	7 orang	-	-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	7 Dokumen	7 Dokumen		
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-

Kinerja Keuangan

Kode rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alasan Tidak Diserap (Rp)			
					Efisiensi	Sisa Lelan g	Lelan g Gagal	Kegiatan tidak dilaksanakana n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.02	SEKRETARIAT DPRD	89.838.371.811,00	80.824.043.736,23	89,97	9.014.328.074,77			
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.892.083.332,00	42.107.628.294,23	98,17	784.455.037,77			
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	556.524.000,00	482.039.887,00	86,62	74.484.113,00	-	-	-
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	336.356.000,00	300.696.779,00	89,40	35.659.221,00	-	-	-
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	158.992.000,00	131.041.608,00	82,42	27.950.392,00	-	-	-
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.176.000,00	50.301.500,00	82,22	10.874.500,00	-	-	-

Kode rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alasan Tidak Diserap (Rp)			
					Efisiensi	Sisa Lelan g	Lelan g Gagal	Kegiatan tidak dilaksanakana n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.02.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121.933.900,00	121.933.900,00	100,00	0,00	-	-	-
4.02.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.466.000,00	56.846.000,00	92,48	4.620.000,00	-	-	-
4.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	169.702.000,00	133.130.000,00	78,45	36.572.000,00	-	-	-
4.02.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	134.325.910,00	134.300.910,00	99,98	25.000,00	-	-	-
4.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.878.616,00	149.565.534,00	99,79	313.082,00	-	-	-
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.809.000,00	128.400.000,00	85,71	21.409.000,00	-	-	-
4.02.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.809.000,00	128.400.000,00	85,71	21.409.000,00	-	-	-
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.494.012.282,00	2.451.496.327,00	98,30	42.515.955,00	-	-	-
4.02.01.2.0	Penyediaan Jasa Surat	20.122.000,00	19.800.000,00	98,40	322.000,00	-	-	-

Kode rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alasan Tidak Diserap (Rp)			
					Efisiensi	Sisa Lelan g	Lelan g Gagal	Kegiatan tidak dilaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01	Menyurat							
4.02.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	362.108.782,00	359.717.088,00	99,34	2.391.694,00	-	-	-
4.02.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.111.781.500,00	2.071.979.239,00	98,12	39.802.261,00	-	-	-
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.140.636.988,00	1.045.535.966,08	91,66	95.101.021,92	-	-	-
4.02.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.325.000,00	122.887.455,00	78,61	33.437.545,00	-	-	-
4.02.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	341.901.000,00	317.434.743,00	92,84	24.466.257,00	-	-	-

Kode rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alasan Tidak Diserap (Rp)			
					Efisiensi	Sisa Lelan g	Lelan g Gagal	Kegiatan tidak dilaksanakana n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Operasional atau Lapangan							
4.02.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	10.125.000,00	125.000,00	1,23	10.000.000,00	-	-	-
4.02.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.039.050,00	125.041.800,00	86,81	18.997.250,00	-	-	-
4.02.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.891.548,00	204.891.531,15	100,00	16,85	-	-	-
4.02.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	283.355.390,00	275.155.436,93	97,11	8.199.953,07	-	-	-
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32.333.268.000,00	32.085.222.759,00	99,23	248.045.241,00	-	-	-
4.02.01.2.1 5.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	31.834.518.000,00	31.644.337.759,00	99,40	190.180.241,00	-	-	-
4.02.01.2.1 5.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	423.750.000,00	423.750.000,00	100,00	0,00	-	-	-
4.02.01.2.1	Pelaksanaan Medical	75.000.000.00	17.135.000,00	22,85	57.865.000,00	-	-	-

Kode rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alasan Tidak Diserap (Rp)			
					Efisiensi	Sisa Lelan g	Lelan g Gagal	Kegiatan tidak dilaksanakana n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.03	Check Up DPRD							
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	90.027.991,00	61.695.584,00	68,53	28.332.407,00	-	-	-
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	37.977.991,00	20.805.584,00	54,78	17.172.407,00			
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52.050.000,00	40.890.000,00	78,56	11.160.000,00	-	-	-
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.946.288.479,00	38.716.415.442,00	82,47	8.229.873.037,00			
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.598.575.245,00	3.880.613.027,00	69,31	1.717.962.218,00	-	-	-
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	294.025.000,00	123.275.505,00	41,93	170.749.495,00	-	-	-
4.02.02.2.0	Pembahasan Rancangan	2.209.470.300,0	1.157.889.825,0	52,41	1.051.580.475,	-	-	-

Kode rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alasan Tidak Diserap (Rp)			
					Efisiensi	Sisa Lelan g	Lelan g Gagal	Kegiatan tidak dilaksanakana n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02	Peraturan Daerah	0	0		00			
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	654.435.600,00	479.088.500,00	73,21	175.347.100,00	-	-	-
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2.085.960.400,00	1.862.794.197,00	89,30	223.166.203,00	-	-	-
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	354.683.945,00	257.565.000,00	72,62	97.118.945,00	-	-	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.438.717.400,00	1.092.851.695,00	75,96	345.865.705,00	-	-	-
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	225.032.400,00	222.905.625,00	99,05	2.126.775,00	-	-	-
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	272.941.300,00	225.093.750,00	82,47	47.847.550,00	-	-	-
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	306.186.000,00	213.848.225,00	69,84	92.337.775,00			
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	378.653.900,00	207.674.125,00	54,85	170.979.775,00	-	-	-
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	36.581.100,00	15.717.700,00	42,97	20.863.400,00	-	-	-

Kode rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alasan Tidak Diserap (Rp)			
					Efisiensi	Sisa Lelan g	Lelan g Gagal	Kegiatan tidak dilaksanakana n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							
4.02.02.2.0 3.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	48.719.700,00	29.185.075,00	59,90	19.534.625,00	-	-	-
4.02.02.2.0 3.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	265.188.980,00	259.255.075,00	97,76	5.933.905,00	-	-	-
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	27.435.782.138,00	22.327.077.879,00	81,38	5.108.704.259,00	-	-	-
4.02.02.2.0 4.02	Pendalaman Tugas DPRD	3.210.084.200,00	1.747.225.341,00	54,43	1.462.858.859,00	-	-	-
4.02.02.2.0 4.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	23.502.267.938,00	19.938.786.038,00	84,84	3.563.481.900,00	-	-	-
4.02.02.2.0 4.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	0,00	-	-	-
4.02.02.2.0 4.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	145.929.000,00	102.032.500,00	69,92	43.896.500,00	-	-	-
4.02.02.2.0 4.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	325.501.000,00	287.034.000,00	88,18	38.467.000,00	-	-	-
4.02.02.2.	Penyerapan dan	2.149.847.900,0	1.889.061.316,0	87,87	260.786.584,0	-	-	-

Kode rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alasan Tidak Diserap (Rp)			
					Efisiensi	Sisa Lelan g	Lelan g Gagal	Kegiatan tidak dilaksanakana n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
05	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	0	0		0			
4.02.02.2.0 5.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	510.153.800,00	489.757.600,00	96,00	20.396.200,00	-	-	-
4.02.02.2.0 5.03	Pelaksanaan Reses	1.639.694.100,00	1.399.303.716,00	85,34	240.390.384,00	-	-	-
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	36.870.700,00	31.212.000,00	84,65	5.658.700,00	-	-	-
4.02.02.2.0 6.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	36.870.700,00	31.212.000,00	84,65	5.658.700,00	-	-	-
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.02.02.2.0 6.07	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	9.615.432.400,00	9.108.384.755,00	94,73	507.047.645,00	-	-	-
4.02.02.2.0 8.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.261.634.600,00	7.777.964.034,00	94,15	483.670.566,00	-	-	-

**Realisasi Keuangan Per-Program
Tahun 2023**

No	Program	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Ket (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.892.083.332,00	42.107.628.294,23	98,17
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.946.288.479,00	38.716.415.442,00	82,47
	JUMLAH	89.838.371.811,00	80.824.043.736,23	89,97

Tabel 3
Realisasi Keuangan Per-Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2023

N o	Program	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisa si	Keterangan (Efisiensi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.892.083.332,00	42.107.628.294,23	98,17	784.455.037,77
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	556.524.000,00	482.039.887,00	86,62	74.484.113,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	336.356.000,00	300.696.779,00	89,40	35.659.221,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	158.992.000,00	131.041.608,00	82,42	27.950.392,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.176.000,00	50.301.500,00	82,22	10.874.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.004.595.600,00	4.835.311.591,15	96,62	169.284.008,85
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.848.774.000,00	4.698.351.491,15	96,90	150.422.508,85

5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.856.600,00	110.170.100,00	88,95	13.686.500,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.365.000,00	11.790.000,00	88,22	1.575.000,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12.300.000,00	8.700.000,00	70,73	3.600.000,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	271.962.045,00	220.358.836,00	81,03	51.603.209,00
9	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	9.420.000,00	9.081.800,00	96,41	338.200,00
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	217.232.049,00	183.420.036,00	84,44	33.812.013,00
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.309.996,00	27.857.000,00	61,48	17.452.996,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	851.247.426,00	797.567.344,00	93,69	53.680.082,00
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.267.000,00	68.267.000,00	100,00	0,00
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.674.000,00	133.524.000,00	91,66	12.150.000,00
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121.933.900,00	121.933.900,00	100,00	0,00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.466.000,00	56.846.000,00	92,48	4.620.000,00
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.702.000,00	133.130.000,00	78,45	36.572.000,00
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	134.325.910,00	134.300.910,00	99,98	25.000,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.878.616,00	149.565.534,00	99,79	313.082,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.809.000,00	128.400.000,00	85,71	21.409.000,00
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.809.000,00	128.400.000,00	85,71	21.409.000,00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.494.012.282,00	2.451.496.327,00	98,30	42.515.955,00
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.122.000,00	19.800.000,00	98,40	322.000,00
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	362.108.782,00	359.717.088,00	99,34	2.391.694,00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.111.781.500,00	2.071.979.239,00	98,12	39.802.261,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.140.636.988,00	1.045.535.966,08	91,66	95.101.021,92
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.325.000,00	122.887.455,00	78,61	33.437.545,00
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.901.000,00	317.434.743,00	92,84	24.466.257,00
25	Pemeliharaan Mebel	10.125.000,00	125.000,00	1,23	10.000.000,00
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.039.050,00	125.041.800,00	86,81	18.997.250,00
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.891.548,00	204.891.531,15	100,00	16,85
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	283.355.390,00	275.155.436,93	97,11	8.199.953,07
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32.333.268.000,00	32.085.222.759,00	99,23	248.045.241,00
29	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	31.834.518.000,00	31.644.337.759,00	99,40	190.180.241,00
30	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	423.750.000,00	423.750.000,00	100,00	0,00
31	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000,00	17.135.000,00	22,85	57.865.000,00
	Layanan Administrasi DPRD	90.027.991,00	61.695.584,00	68,53	28.332.407,00
32	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	37.977.991,00	20.805.584,00	54,78	17.172.407,00

3 3	Fasilitasi Fraksi DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52.050.000,00	40.890.000,00	78,56	11.160.000,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.946.288.479,00	38.716.415.442,00	82,47	8.229.873.037,00
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.598.575.245,00	3.880.613.027,00	69,31	1.717.962.218,00
3 5	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	294.025.000,00	123.275.505,00	41,93	170.749.495,00
3 6	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.209.470.300,00	1.157.889.825,00	52,41	1.051.580.475,00
3 7	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	654.435.600,00	479.088.500,00	73,21	175.347.100,00
3 8	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2.085.960.400,00	1.862.794.197,00	89,30	223.166.203,00
3 9	Penyusunan Tata Tertib DPRD	354.683.945,00	257.565.000,00	72,62	97.118.945,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.438.717.400,00	1.092.851.695,00	75,96	345.865.705,00
4 0	Pembahasan KUA dan PPAS	225.032.400,00	222.905.625,00	99,05	2.126.775,00
4 1	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	272.941.300,00	225.093.750,00	82,47	47.847.550,00
4 2	Pembahasan APBD	306.186.000,00	213.848.225,00	69,84	92.337.775,00
4 3	Pembahasan APBD Perubahan	378.653.900,00	207.674.125,00	54,85	170.979.775,00
4 4	Pembahasan Laporan Semester	36.581.100,00	15.717.700,00	42,97	20.863.400,00
4 5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	219.322.700,00	207.612.270,00	94,66	11.710.430,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	671.062.696,00	387.214.770,00	57,70	283.847.926,00
4 6	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	89.113.600,00	26.227.815,00	29,43	62.885.785,00
4 7	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	89.113.600,00	39.317.415,00	44,12	49.796.185,00
4 8	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	89.813.216,00	13.082.105,00	14,57	76.731.111,00

4 9	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	89.113.600,00	20.147.285,00	22,61	68.966.315,00
5 0	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1	Pengawasan Penggunaan Anggaran	48.719.700,00	29.185.075,00	59,90	19.534.625,00
5 2	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	265.188.980,00	259.255.075,00	97,76	5.933.905,00
	Peningkatan Kapasitas DPRD	27.435.782.138,00	22.327.077.879,00	81,38	5.108.704.259,00
5 3	Pendalaman Tugas DPRD	3.210.084.200,00	1.747.225.341,00	54,43	1.462.858.859,00
5 4	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	23.502.267.938,00	19.938.786.038,00	84,84	3.563.481.900,00
5 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	0,00
5 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	145.929.000,00	102.032.500,00	69,92	43.896.500,00
5 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	325.501.000,00	287.034.000,00	88,18	38.467.000,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.149.847.900,00	1.889.061.316,00	87,87	260.786.584,00
5 8	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	510.153.800,00	489.757.600,00	96,00	20.396.200,00
5 9	Pelaksanaan Reses	1.639.694.100,00	1.399.303.716,00	85,34	240.390.384,00
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	36.870.700,00	31.212.000,00	84,65	5.658.700,00
6 0	Pengawasan Kode Etik DPRD	36.870.700,00	31.212.000,00	84,65	5.658.700,00
	Pembahasan Kerjasama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	9.615.432.400,00	9.108.384.755,00	94,73	507.047.645,00
6 2	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.261.634.600,00	7.777.964.034,00	94,15	483.670.566,00
6 3	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	244.666.800,00	236.545.210,00	96,68	8.121.590,00
6 4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20.250.000,00	14.594.125,00	72,07	5.655.875,00
6 5	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.088.881.000,00	1.079.281.386,00	99,12	9.599.614,00

Tabel 4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.892.083.332,00	42.107.628.294,23	98,17
2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.946.288.479,00	38.716.415.442,00	82,47

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai Rp. 42.107.628.294,23 atau 98,17 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 42.892.083.332,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 784.455.037,77
2. Realisasi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Rp. 38.716.415.442,00 atau 82,47 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 46.946.288.479,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.229.873.037,00

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	57 orang	57 orang	78 Laporan	375 Laporan	481%	78 Laporan	74 Laporan	95%	
4	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara			294 Unit	384 Unit	131%	294 Unit	174 Unit	59%	
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit, 32 kali	4 Unit, 32 kali	4 Unit	15 Unit	75%	4 Unit	3 Unit	71%	
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit, 104 kali	26 Unit, 104 kali	26 Unit	69 Unit	69%	26 Unit	13 Unit	51%	
4	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	224 Jenis	224 Jenis	156 Unit	145 Unit	93%	156 Unit	72 Unit	46%	
4	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	14 Jenis	14 Jenis	101 Unit	133 Unit	132%	101 Unit	76 Unit	75%	
4	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Jenis, 2 Paket	5 Jenis, 2 Paket	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	

4	0	0	2	0	2.0	3	0	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	54 Kali	54 Kali	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%	
4	0	0	2	0	2.0	3	0	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	54 Kali	54 Kali	12 Laporan	13 Laporan	108%	12 Laporan	32 Laporan	267%	
4	0	0	2	0	2.0	3	0	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	54 Kali	54 Kali	12 Laporan	10 Laporan	83%	12 Laporan	31 Laporan	258%	
4	0	0	2	0	2.0	3	0	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	54 Kali	54 Kali	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	33 Laporan	275%	
4	0	0	2	0	2.0	3	0	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Kali	5 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	0%	
4	0	0	2	0	2.0	3	0	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	8 Kali	8 Kali	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	4 Dokumen	67%	
4	0	0	2	0	2.0	3	0	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Kali	2 Kali	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	-	0%	
4	0	0	2	0	2.0	4	0	2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi peningkatan			300 Dokumen	312 Dokumen	104%	357 Dokumen	146 Dokumen	42%	

4	0	2	0	2.0	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD			182 Dokume n	137 Dokume n	76%	182 Dokume n	45 Dokume n	25%	
4	0	2	0	2.0	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	134 kali	134 kali	116 Dokume n	54 Dokume n	47%	116 Dokume n	8 Dokume n	7%	
4	0	2	0	2.0	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	8 kali	8 kali	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	-	0%	
4	0	2	0	2.0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	37 kali	37 kali	24 Dokume n	14 Dokume n	58%	24 Dokume n	7 Dokume n	29%	
4	0	2	0	2.0	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 kali	36 kali	36 Dokume n	63 Dokume n	175%	36 Dokume n	30 Dokume n	83%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, yang mana dari kegiatan – kegiatan tersebut tingkat realisasi kinerjanya memenuhi target yang diharapkan dan pada tingkat realisasi keuangannya dapat mencapai 100 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik memiliki 4 (empat) bagian yaitu:

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, sarana dan prasarana perlengkapan dan rumah tangga;
3. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga,

pelayanan kesehatan dan pakaian dinas kesekretariatan dan anggota DPRD;

4. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian dalam mendukung DPRD di bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan program, anggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan di bidang program, anggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
3. Pelaksanaan pengendalian penatausahaan keuangan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi evaluasi kinerja program, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan keuangan;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan dukungan DPRD dalam pelaksanaan persidangan dan perundang – undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pelaksanaan persidangan,

- penyiapan *draft* Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan *draft* Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan *draft* Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
 4. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan persidangan, penyiapan *draft* Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
 5. Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
 6. Pelaksanaan pelayanan penyediaan bahan dan penyelenggaraan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.

d. Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi

Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitas fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan administrasi hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan administrasi hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD;
3. Pemberian dukungan pelayanan administrasi hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD;
4. Pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, baik kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Lingkungan Strategis yang dimaksud meliputi lingkungan internal organisasi yang terdiri dari dua faktor, yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor, yaitu peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemerintahan dan pengawasan selama ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Hambatan

1. Regulasi yang mengatur terhadap sistem pengelolaan keuangan masih belum baku atau mengalami perubahan, sehingga sistem penganggaran mengalami keterlambatan;
2. Terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia;
3. Kualitas SDM aparatur yang masih kurang;
4. Kurangnya pemahaman staf akan tupoksi;
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas;
6. Kurangnya program koordinasi yang baik antara DPRD, Pemda dan Masyarakat;
7. Kurangnya program bahan untuk produk – produk DPRD;
8. Kurangnya Sistem Informasi terhadap Layanan Publik;
9. Kurangnya program kerjasama komunikasi dan informatika.

b. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya kendala tersebut, diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi data yang ada dan meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel;
2. Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi beberapa perubahan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu mengantisipasi setiap perubahan dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, selain itu dalam penataan kelembagaan dan penataan personil harus sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Gresik kedepan. Dengan demikian diharapkan pengisian formasi pegawai, jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan beban tugas masing-masing satuan kerja dan kemampuan yang dimiliki pegawai;
3. Peningkatan kemampuan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dengan ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas – tugas dan disesuaikan dengan aturan – aturan yang berlaku;
4. Peningkatan sarana dan prasarana kantor;
5. Meningkatkan koordinasi yang baik antara DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
6. Meningkatkan penyediaan buku – buku bacaan pengetahuan dan peraturan perundang – undangan sebagai bahan referensi dalam pembahasan Ranperda;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat;
8. Meningkatkan kerjasama dalam penyusunan dan penerbitan profil DPRD dan Liflat DPRD.

2.4. Review terhadap RKPD

Berdasarkan analisa kebutuhan untuk Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 tidak ada yang berubah dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025

Adapun hasil review terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6

Review Terhadap RKPD Tahun 2025

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kab.Gresik

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				41.868.887.098	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				41.868.887.098	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				339.345.689	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				339.345.689	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	152.779.345	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	152.779.345	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	17 Laporan	126.065.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	17 Laporan	126.065.100	-

	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60.501.244	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60.501.244	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.834.226.858	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.834.226.858	-
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	4.711.144.178	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	4.711.144.178	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1238 Dokumen	81.168.125	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1238 Dokumen	81.168.125	-

			DPRD							
	Fasilitasi Tugas DPRD				13.128.693.754	Fasilitasi Tugas DPRD				13.128.693.754
62	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	5.777.154.500	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	5.777.154.500
63	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	6 Laporan	353.470.375	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	6 Laporan	353.470.375
64	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen	25.200.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen	25.200.000
65	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	86 Dokumen	6.972.868.879	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	86 Dokumen	6.972.868.879
	JUMLAH				92.575.589.478	JUMLAH				92.575.589.478

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini diawali dengan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan yakni dari DPRD, Sekretariat DPRD juga dari instansi lain. Namun pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini tidak ada usulan program, kegiatan maupun sub kegiatan dari kelompok masyarakat, karena Sekretariat DPRD bukan Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan yang ditangani oleh Sekretariat DPRD hanya Urusan Sekretariat DPRD. Urusan tersebut dalam rangka memaksimalkan peran legislatif sebagai mitra Pemerintah Kabupaten khususnya dalam hal penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berpihak pada kepentingan publik serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi sasaran dari Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dengan demikian setiap sasaran dari tujuan organisasi mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut maka dapat ditentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sesuai hasil pemetaan Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Rincian Tujuan dan Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebanyak 2 program, 16 kegiatan dan 65 sub kegiatan yang lokasi pelaksanaan program dan kegiatannya di Kabupaten Gresik. Sebagian besar rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas DPRD. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Mebel;
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
- 9. Layanan Administrasi DPRD, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
 - b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

DPRD, dengan kegiatan :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD;
 - f. Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Pembahasan APBD;
 - d. Pembahasan APBD Perubahan;
 - e. Pembahasan Laporan Semester;
 - f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. Pengawasan Penggunaan Anggaran;
 - g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

4. Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendalaman Tugas DPRD;
 - b. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - d. Penyusunan Program Kerja DPRD;
 - e. Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - b. Pelaksanaan Reses.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Kode Etik DPRD.
7. Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Adapun rincian rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN GRESIK
(HASIL FORUM OPD)

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Indikatif SE	Pagu Dana	
				Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.02		SEKRETARIAT DPRD				78.223.649.288,00	107.389.675.906	116.188.018.266
4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	A	A	5.254.412.584,00	6.991.410.106	5.550.963.153
4.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	30 Dokumen	30 Dokumen	361.485.646,00	471.164.620	511.213.613
1	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	174.918.570,00	226.660.960	245.927.142
2	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan	126.063.300,00	161.485.000	175.211.225

3	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	60.503.776,00	83.018.660	90.075.246
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	1253 Dokumen	1253 Dokumen	4.892.926.938,00	6.520.245.486	5.039.749.541
4	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	4.711.144.178,00	4.711.144.178	4.781.811.341
5	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1238 Dokumen	1238 Dokumen	139.868.000,00	191.711.300	208.006.761
6	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	17.859.760,00	17.859.760	19.377.840
7	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	9 Laporan	15.777.500,00	18.505.000	20.077.925
8	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	8.277.500,00	9.655.000	10.475.675
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase Ketercapaian Sasaran Program Perangkat Daerah	100%	100%	36.534.319.251,00	38.396.614.458	41.660.326.687

	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	17 Dokumen	17 Dokumen	142.895.530,00	168.473.900	182.794.182
9	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	17 Dokumen	5.090.500,00	10.181.000	11.046.385
10	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	13 Orang	117.361.030,00	133.372.900	144.709.597
11	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	20.444.000,00	24.920.000	27.038.200
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan 2. Tingkat kematangan layanan aspirasi masyarakat	231 Dokumen Tingkat 3	231 Dokumen Tingkat 3	527.469.071,00	883.631.969	958.740.686
12	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.726.088,00	108.206.200	117.403.727
13	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	76.335.793,00	139.952.225	151.848.164
14	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	84.417.872,00	110.515.744	119.909.582
15	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74 Paket	74 Paket	82.254.324,00	98.865.000	107.268.525

16	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	82.723.575,00	87.364.200	94.790.157
17	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	132 Laporan	68.015.500,00	136.031.000	147.593.635
18	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	65.145.920,00	93.065.600	100.976.176
19	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	14.850.000,00	109.632.000	118.950.720
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	2 Unit	0,00	253.131.489	274.647.666
20	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	253.131.489	274.647.666
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	138 Laporan	2.630.492.000,00	2.634.342.000	2.858.261.070
21	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	27.716.000,00	31.566.000	34.249.110
22	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	325.560.000,00	325.560.000	353.232.600
23	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	76 Laporan	2.277.216.000,00	2.277.216.000	2.470.779.360

	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	86 Unit	86 Unit	600.834.650,00	1.302.607.100	1.413.328.704
24	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	83.507.000,00	196.076.350	212.742.840
25	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	105.250.000,00	229.000.000	248.465.000
26	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	5.000.000,00	10.000.000	10.850.000
27	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	68.822.500,00	134.145.000	145.547.325
28	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	113.405.750,00	239.507.750	259.865.909
29	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	224.849.400,00	493.878.000	535.857.630
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	50 Orang	50 Orang	32.378.428.000,00	32.954.428.000	35.755.554.380
30	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	32.303.428.000,00	32.303.428.000	35.049.219.380

31	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0,00	576.000.000	624.960.000
32	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	75.000.000	81.375.000
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi	10 Laporan	10 Laporan	254.200.000,00	200.000.000	217.000.000
33	4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	50.000.000	54.250.000
34	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	5 Laporan	219.200.000,00	150.000.000	162.750.000
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	100%	100%	4.983.259.629,00	25.406.202.267	27.565.729.460
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	16 Dokumen	16 Dokumen	4.983.259.629,00	25.406.202.267	27.565.729.460
35	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	437.379.109,00	587.221.592	637.135.427
36	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	1.993.108.096,00	2.695.473.151	2.924.588.369
37	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	400.350.038,00	530.078.526	575.135.201

45	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4 Dokumen	4 Dokumen	17.450.795,00	30.275.350	32.848.755
46	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	322.045.545,00	366.577.650	397.736.750
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3. Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan DPRD	100%	100%	10.388.308.060,00	17.219.903.350	18.683.595.135
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	251 Laporan	251 Laporan	8.779.959.545,00	14.410.462.900	15.635.352.247
47	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	60 Laporan	1.944.794.375,00	3.289.385.750	3.568.983.539
48	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan	60 Laporan	1.944.794.375,00	3.289.385.750	3.568.983.539
49	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	60 Laporan	2.259.186.475,00	3.736.233.750	4.053.813.619
50	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan	60 Laporan	1.944.794.375,00	3.289.385.750	3.568.983.539
51	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	322.972.525,00	367.475.450	398.710.863

52	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	29.217.200,00	52.544.800	57.011.108
53	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	334.200.220,00	386.051.650	418.866.040
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	7 Dokumen	7 Dokumen	1.579.250.200,00	2.767.669.700	3.002.921.625
54	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	630.259.250,00	1.127.975.600	1.223.853.526
55	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	948.990.950,00	1.639.694.100	1.779.068.099
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	29.098.315,00	41.770.750	45.321.264
56	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	29.098.315,00	41.770.750	45.321.264
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4. Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	19.426.361.359,00	19.066.160.923	20.686.784.601
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	292 Dokumen	292 Dokumen	12.467.798.609,00	9.134.811.973	9.911.270.991
57	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	486.471.261,00	3.842.619.471	4.169.242.126
58	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	3.169.782.636,00	3.842.619.471	4.169.242.126

59	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	252.530.000,00	253.060.000	274.570.100
60	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	89.847.011,00	134.847.011	146.309.007
61	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	351.820.650,00	459.684.450	498.757.628
62	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	261 Dokumen	261 Dokumen	8.117.347.052,00	4.444.601.041	4.822.392.129
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	128 Dokumen	128 Dokumen	6.958.562.750,00	9.931.348.950	10.775.513.611
63	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.805.233.900,00	4.020.639.500	4.362.393.858
64	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	6 Laporan	6 Laporan	353.557.250,00	462.122.450	501.402.858
65	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen	24 Dokumen	11.242.000,00	22.484.000	24.395.140
66	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	86 Dokumen	86 Dokumen	3.788.529.600,00	5.426.103.000	5.887.321.755
TOTAL						78.223.649.288,00	107.389.675.906	116.188.018.266

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026. Prioritas Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Forum Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari Sekretariat DPRD, DPRD Mitra dan Perangkat Daerah terkait.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 jumlah anggaran yang akan dikelola oleh Sekretariat DPRD sebesar Rp 92.575.589.478,00 (Sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah). Pagu Anggaran Sekretariat DPRD tersebut dijabarkan dalam rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025 sebagaimana sebagaimana Nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Adapun rincian rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 9

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025							Ket
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
							Progr am	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	4.02	SEKRETARIAT DPRD								92.575.589.478			
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								41.868.887.098			
	4.02.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								339.345.689			

1	4.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Dokume n Perencan aan. Pengg angan. dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Kab.Gresi k	A Nilai	9 Doku men	100%	152.779.345	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
2	4.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhi nya Dokume n Perencan aan. Pengg angan. dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Kab.Gresi k	A Nilai	17 Lapora n	100%	126.065.100	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
3	4.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Dokume n Perencan aan. Pengg	Kab.Gresi k	A Nilai	4 Lapora n	100%	60.501.244	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	

			program OPD		Kepegaw aian Perangka t Daerah						Alokasi Umum
10	4.02.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentas e Ketercapa ian Sasaran Program OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tercukup inya Layanan Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Kab.Gresi k	100 %	13 Orang	100 %	117.361.030	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum
11	4.02.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentas e Ketercapa ian Sasaran Program OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Tercukup inya Layanan Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Kab.Gresi k	100 %	5 Orang	100 %	20.444.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum
	4.02.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								502.419.071	
12	4.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentas e Ketercapa ian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercukup inya Layanan Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kab.Gresi k	100 %	1 Paket	100 %	53.726.088	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum

16	4.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercakupnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Gresik	100 %	5 Paket	100 %	82.723.575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
17	4.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercakupnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Gresik	100 %	132 Laporan	100 %	63.515.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
18	4.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercakupnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Gresik	100 %	15 Laporan	100 %	65.145.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
19	4.02.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Tercakupnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Gresik	100 %	1 Dokumen	100 %	28.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

22	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	100 %	12 Laporan	100 %	325.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
23	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gresik	100 %	75 Laporan	100 %	2.277.216.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								537.416.150		
24	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab.Gresik	100 %	4 Unit	100 %	83.507.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

34	4.02.01.2.1 6.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Kab.Gresik	100 %	5 Laporan	100 %	102.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								50.706.702.380	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								10.108.093.509	
35	4.02.02.2.0 1.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab.Gresik	100%	2 Dokumen	100%	437.379.109	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
36	4.02.02.2.0 1.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab.Gresik	100%	8 Dokumen	100%	1.993.108.095	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

37	4.02.02.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentas e fasilitasi pelaksana an tugas dan fungsi penyusun an regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Terfasilit asinya Pembent ukan Peratura n Daerah dan Peratura n DPRD	Kab.Gresi k	100%	1 Doku men	100%	400.350.038	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
38	4.02.02.2.0 1.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentas e fasilitasi pelaksana an tugas dan fungsi penyusun an regulasi DPRD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan proses penyusunan naskah akademik dan Ranperda inisiatif DPRD	Terfasilit asinya Pembent ukan Peratura n Daerah dan Peratura n DPRD	Kab.Gresi k	100%	4 Doku men	100%	1.877.256.267	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
39	4.02.02.2.0 1.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentas e fasilitasi pelaksana an tugas dan fungsi penyusun an regulasi DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Terfasilit asinya Pembent ukan Peratura n Daerah dan Peratura n DPRD	Kab.Gresi k	100%	1 Doku men	100%	0	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
40	4.02.02.2.0 1.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD	Persentas e fasilitasi pelaksana	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Terfasilit asinya Pembent	Kab.Gresi k	100%	120.00 0 orang	100%	5.400.000.000	Dana Transfe r	

		dan Pemerintah Daerah	an tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	ukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Umum-Dana Alokasi Umum	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran								1.636.987.900		
41	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terfasilitasi asinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	317.353.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
42	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan Perubahan PPAS	Terfasilitasi asinya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab.Gresik	100%	4 Dokumen	100%	326.267.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
43	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terfasilitasi asinya Kegiatan Pembahasan	Kab.Gresik	100%	6 Dokumen	100%	315.592.950	Dana Transfer Umum-Dana	

			fungsi pengang aran DPRD		Kebijaka n Anggaran							Alokasi Umum
44	4.02.02.2.0 2.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentas e fasilitasi pelaksana an tugas dan fungsi pengang aran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Terfasilit asinya Kegiatan Pembaha san Kebijaka n Anggaran	Kab.Gresi k	100%	4 Doku men	100%	338.277.850	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
45	4.02.02.2.0 2.0005	Pembahasan Laporan Semester	Persentas e fasilitasi pelaksana an tugas dan fungsi pengang aran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terfasilit asinya Kegiatan Pembaha san Kebijaka n Anggaran	Kab.Gresi k	100%	4 Doku men	100%	17.450.700	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
46	4.02.02.2.0 2.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentas e fasilitasi pelaksana an tugas dan fungsi pengang aran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	Terfasilit asinya Kegiatan Pembaha san Kebijaka n Anggaran	Kab.Gresi k	100%	4 Doku men	100%	322.045.400	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	
	4.02.02.2. 03	Pengawasan Penyelenggaraan								16.543.693.400		

	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD									7.273.110.667		
54	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab.Gresik	A Kualitas	6 Dokumen	100%	2.444.948.756	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
55	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah tenaga ahli Fraksi	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab.Gresik	A Kualitas	7 Orang	100%	252.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
56	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab.Gresik	A Kualitas	24 Dokumen	100%	152.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
57	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab.Gresik	A Kualitas	1 Dokumen	100%	351.637.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

BAB V

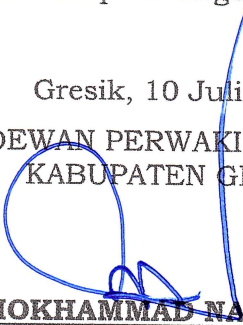
P E N U T U P

Sebagai penutup Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebagai bahan Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (*stakeholders*) yang berkaitan dengan kegiatan Sekretariat DPRD harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik;
3. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi agar taat azas dan konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Gresik, 10 Juli 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011